

HUBUNGAN ANTAR BANGSA: TINJAUAN TEORITIS DAN REALITAS

Syarif Ibrahim Al-Qadrie

Pendahuluan

Hubungan antar bangsa adalah fenomena sosial yang menarik dan tidak dapat dihindari oleh negara manapun, khususnya sejak pertengahan abad ke 20. Hubungan ini menarik sebab ia menjadi lapangan dan obyek studi yang penting dan sangat menarik perhatian banyak pakar, kalangan akademisi dan aparat pemerintahan, sekaligus sering menghasilkan projek penelitian dan karya yang menguntungkan banyak pihak. Studi serta tulisan-tulisan tentang hubungan antar bangsa, hubungan dan politik luar negeri (*foreign politics and relationship*), perbandingan politik, dan sejenisnya, yang berkembang dan tersebar diseluruh dunia, merupakan bukti daya tarik dari fenomena yang disebutkan di atas.

Tidak dapat terhindarkannya hubungan antar bangsa di dasari oleh fakta bahwa hubungan semacam itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa agar ia dapat melanjutkan hidupnya baik sebagai suatu entiti yang diikat secara budaya dan politik (*cultural dan political unity*) dari berbagai kelompok etnik internal yang membentuk masyarakat sipil (*civil society*) di dalam negara yang bersangkutan, maupun sebagai bagian dari sistem dunia.

Keperluan manusia atau masyarakat setiap masa selalu meningkat dan peningkatannya bergantung pada kompleksitas keadaan yang selalu berkembang sesuai dengan perjalanan atau perkembangan masa dan dengan perkembangan kondisi kehidupan itu sendiri yang disebabkan oleh peningkatan pada pendidikan dan kualitas hidup. Peningkatan keperluan hidup manusia yang hidup dalam suatu negara menyebabkan hubungan antara negara semakin meningkat pula. Negara, yang diwakili oleh pemerintah masing-masing, memerlukan hubungan itu meningkat, karena meningkatnya hubungan itu berarti bahwa tujuan umum setiap negara yaitu penyelenggaraan kesejahteraan atau kemakmuran bagi rakyatnya dan penciptaan perdamaian dunia (Tim BP7, 1995) dapat lebih ditingkatkan.

Politik luar negeri dan sekaligus politik dalam negeri suatu negara, yang merupakan kebijaksanaan resmi dari negara tersebut, mempengaruhi corak dan karakter hubungan negara tersebut dengan negara lain dalam melaksanakan dua tujuan umum sebagaimana disebutkan di atas.

Tulisan ini berusaha mengungkapkannya mengapa hubungan antar bangsa itu terjadi? Dengan kata lain faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan antar bangsa? Bagaimana karakter atau sifat hubungan antar bangsa itu dari masa kemasa?. Dengan kata lain adakah unsur timbal balik yang saling

menguntungkan melandiasi politik hubungan antar bangsa sepanjang perjalanan sejarah? Selain itu, tulisan ini juga ingin menjelaskan bagaimana fenomena kestabilan dunia dan ketergantungan merupakan dua topik yang mengandung hubungan sebab akibat yang simetrik (*symmetrically causal relationship*), dan keduanya berkaitan dengan dan memberi corak bagi hubungan antar bangsa.

Faktor-faktor dan Fungsi Hubungan Antar Bangsa

Hubungan antar bangsa ditimbulkan oleh kesadaran bahwa tidak ada suatu bangsa yang dapat memenuhi semua keperluan mereka secara lengkap dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan tidak saja dalam letak geografis, keadaan alam atau iklim, dan keadaan demografik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya, seperti tingkat dan pemilihan teknologi yang digunakan, dan pengalaman khas dalam berproduksi.

Sebagai suatu contoh, kondisi geografis, alam dan iklim yang khas, yang menyebabkan negara-negara Barat tidak memiliki rempah-rempah, karet alam, kelapa, hasil-hasil hutan tropis dan lain sebagainya, mendorong mereka mengadakan hubungan dengan negara-negara yang terletak disekitar garis Khatulistiwa yang menghasilkan komoditi alam seperti di atas. Begitu juga sebaliknya. Demikian pula pengalihan teknologi dan pengalaman berproduksi dari negara-negara industri maju (NIM) kepada negara-negara sedang berkembang (NSB), yang menjadi salah satu topik penting dalam hubungan antar bangsa, merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam tingkat dan pemilihan teknologi.

Usaha untuk memenuhi keperluan dalam negeri yang selalu meningkat itu mendorong bangsa-bangsa di dunia ini untuk mengadakan hubungan kerjasama antar bangsa. Perbedaan karakteristik dari bangsa-bangsa di dunia dan dorongan untuk diakui sebagai bagian atau sub sistem dari sistem dunia menimbulkan pembahagian kerja antara bangsa.

Dari beberapa teori tentang pembahagian kerja, Teori Pembagian Kerja Dalam Masyarakat yang dikemukakan oleh Emile Durkheim (1984) dipandang sebagai teori yang cukup mendasar. Durkheim melihat bahwa keperluan hidup manusia, yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kehidupan mereka dalam masyarakat, selalu berkembang dan menjadi kompleks sejalan dengan berkembang dan meningkatnya peradaban manusia. Terbatasnya alat atau materi pemenuhan keperluan itu menyebabkan manusia sebagai anggota masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi keperluan mereka secara utuh dan lengkap. Kesulitan semacam itu bertambah lagi dengan perbedaan yang ada diantara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Perbedaan itu pada dasarnya meliputi perbedaan dalam kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh satu kelompok masyarakat disatu pihak tetapi

tidak dimiliki oleh kelompok lainnya dilain fihak.

Perbedaan pada kemampuan dan karakteristik itu bersumber baik pada faktor letak geografis, iklim dan kondisi alam lainnya; tingkat sosial ekonomi dan tingkat atau pengalaman dalam teknologi; faktor jenis kelamin dan genetik; maupun pada faktor etnisitas.

Suatu kelompok masyarakat yang secara geografis tidak berada di kota tetapi sebaliknya dilingkupi oleh lingkungan alam dan iklim yang sesuai dengan pertanian (Kawasan Perdesaan) dan kondisi tanah yang subur menciptakan masyarakat agraris yang kaya dengan pengalaman pertanian dan teknologi pertanian yang memadai. Ini berbeda dengan masyarakat industri perkotaan yang memiliki tingkat teknologi perindustrian yang tinggi berdasarkan pengalaman-pengalaman industri. Kedua macam kelompok masyarakat ini, masyarakat pedesaan dan perkotaan (*rural and urban communities*), perlu mengadakan hubungan kerjasama dalam rangka memenuhi keperluan mereka yang tidak mereka hasilkan tetapi mereka perlukan.

Demikian pula dengan kelompok-kelompok etnik (*ethnic groups*) yang mengharuskan mereka untuk mengadakan hubungan kerjasama antara mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat dan mengembangkan mutu kehidupan mereka, karena mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan atau dalam menguasai jenis teknologi tertentu yang tidak dikuasai oleh kelompok etnik lainnya sesuai dengan kondisi geografis; tingkat sosial, ekonomi dan teknologi; dan pengalaman yang mereka masing-masing miliki. Sebagai suatu contoh, kelompok etnik atau Puak Dayak, khususnya Punan, di pedalaman Kalimantan Indonesia atau di Sarawak dan Sabah, Malaysia, lebih menguasai hal-hal yang berkaitan subsektor kehutanan sehingga mereka memperoleh julukan sebagai ahli hutan (*forest specialists*) (Alqadrie, 1987; 1993; 101-102). Petani perantau Bugis di Kalimantan Barat dan Riau, karena keberhasilan mereka di subsektor perkebunan tanaman keras/tanaman tahunan, mendapat julukan sebagai petani yang ahli dalam tanaman keras dan dalam tanaman yang cepat menghasilkan uang (*long-life crop and cash-crop specialists*) (Alqadrie, 1987:101;1992a:86-87). Demikian pula pada puak atau kelompok etnik Madura, mereka berhasil dalam subsektor peternakan, khususnya peternakan dan penggtemukan sapi, karena itu mereka dianggap sebagai ahli sapi (*cattle specialists*) (Alqadrie, 1987:106-107; 1991a:481). Sementara petani dari kelompok etnik Melayu tampaknya lebih menguasai subsektor perkaretan atau pergetahan (*rubber crops and industry*). Perbedaan dalam kemampuan dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu oleh satu kelompok etnik yang tidak dikuasai oleh kelompok lain menyebabkan tidak saja kelompok etnik tertentu memiliki identitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki tetapi juga timbulnya dorongan bagi kelompok-kelompok yang berbeda itu untuk mengadakan hubungan kerjasama antara mereka untuk memenuhi dan melengkapi keperluan mereka yang tidak mungkin mereka penuhi sendiri-sendiri.

Dalam masyarakat moderen sekarang ini, walaupun keberadaan kaum wanita dalam berbagai bidang kemasyarakatan tidak dapat terbantahkan lagi, namun peranan mereka tetap terspesialisasi dan bahkan unik yang sangat berbeda dengan peranan kaum pria (Purnamawati dalam Akcaya, 1996:2). Keadaan inilah yang menyebabkan pembagian atau hubungan kerja antara jenis kelamin (*division of labor between sexes*) tetap menjadi hal yang penting. Bahkan, jika hubungan kerja antara jenis kelamin ini dikurangi sampai pada titik tertentu, menurut Durkheim (1984:21), kehidupan perkawinan akan hilang, yang tinggal hanyalah hubungan seks (*sexual relationship*). Ini merupakan salah satu contoh pentingnya hubungan kerja dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dampak penting dari pembagian kerja, sebagaimana ditemukan oleh Durkheim, bukan semata-mata meningkatkan produktivitas dari fungsi-fungsi yang telah dibagi-bagi dalam kelompok masyarakat yang berbeda-beda itu, tetapi hubungan itu mempersatukan mereka satu dengan lainnya dan memungkinkan masyarakat ada dan jelas keberadaan mereka, jika pembagian kerja atau hubungan dalam masyarakat berfungsi bukan hanya untuk meningkatkan keberadaan dan pemenuhan keperluan mereka, tetapi justru sebagai dikemukakan oleh Durkheim (1984) untuk menciptakan dan meningkatkan solidaritas antara kelompok dalam masyarakat baik solidaritas mekanis maupun solidaritas organik.

Dalam ruang lingkup dunia, hubungan antar bangsa dalam konteks ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi dan meningkatkan keperluan bangsa-bangsa yang terlibat dalam hubungan itu tetapi juga dan ini terpenting, untuk menunjukkan keberadaan bangsa-bangsa tersebut dalam sistem dunia dan untuk meningkatkan kerjasama serta kesetiakawanan antara mereka.

Latar Belakang dan Realitas Hubungan Antar Bangsa

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, hubungan antar bangsa terjadi karena adanya perbedaan alam, sosial, ekonomi dan budaya antara mereka, perbedaan mana perlu dijembatani dengan hubungan dan kerjasama sehingga keperluan atau kebutuhan mereka yang kompleks dan selalu meningkat dapat terpenuhi. Dari sini kita dapat melihat bahwa kompleksitas keperluan yang harus dipenuhi secara tetap dan terus menerus merupakan pendorong utama suatu bangsa untuk mengadakan hubungan dengan bangsa lain.

Secara ekonomi, tingkat keperluan (kebutuhan), kualitas dan keragaman (variasi) dari keperluan itu, dan kemampuan suatu bangsa memenuhinya, merupakan salah satu indikator tingkat kemampuan ekonomi dari bangsa tersebut (Tohir, 1971:11 dan Sukirno, 1981). Indikator seperti inilah yang ditampilkan oleh bangsa-bangsa Barat (bangsa-bangsa Eropah sejak abad ke 15 dan bangsa Amerika Serikat sejak ke 20) agar mereka dapat diklasifikasikan sebagai bangsa besar, pemimpin dunia, bahkan pilisi dunia (Alqadrie, 1991b:1-20). Keterbatasan bangsa-bangsa Barat untuk memenuhi indikator tersebut

disatu fihak dan keinginan untuk mewujudkan ambisi mereka agar menjadi bangsa besar dan pemimpin dunia dalam bidang ekonomi, politik dan militer, mendorong mereka untuk menggunakan jalur 'hubungan' antar bangsa, khususnya dengan bangsa-bangsa dari negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin (AAA), yang belum maju dan kemudian menjadi negara jajahan mereka dan yang selanjutnya disebut NSB.

Dari segi ini, paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan Bangsa-Bangsa Barat, khususnya sebelum pertengahan abad ke 20, ingin mengadakan hubungan dengan AAA agar kemampuan ekonomi dan politik mereka bertambah kuat yaitu faktor Dalam (*internal*), dan faktor Luar (*external*).

Faktor Dalam berkaitan dengan ketidak mampuan beberapa negara-negara Barat secara ekonomi dan politik untuk memenuhi keperluan mereka masing-masing. Tanpa upaya keras untuk mencari jalan ke luar dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan politik dalam negeri, bangsa-bangsa tersebut akan tetap dibelenggu oleh kemiskinan. Faktor Luar berhubungan dengan ketakutan negara-negara tersebut akan terlempar dari status mereka atau mengalami degradasi sebagai negara kuat dan kaya dalam sistem dunia sebagai akibat dari kegagalan mereka meningkatkan kemampuan ekonomi maupun mempertahankan posisi mereka sebagai negara kaya. Analisis lebih lanjut mengenai Teori Sistem Dunia ini dapat dilihat dalam beberapa tulisan internasional Wallerstein (1979; 1987). Upaya keras bangsa-bangsa Eropah untuk mengatasi ekonomi dalam negeri dan ambisi mereka untuk menjadi unggul dalam persaingan antar mereka atau paling tidak untuk tetap bertahan pada status semula dalam sistem dunia, mendorong mereka untuk mengadakan ekspansi ke luar Eropah untuk memperoleh jalur ekonomi yang menguntungkan mereka melalui apa yang disebut dengan 'hubungan antar bangsa'.

Dari apa yang kita kenal melalui Emmanuel Wallerstein (1987) sejak abad ke 14 dunia telah mulai terintegrasi ke dalam satu sistem dunia yang terbagi ke dalam tiga bagian: masyarakat inti (*core society*), masyarakat setengah pinggir (*semi peripheral society*) dan masyarakat pinggir (*peripheral society*).

Sejak masa itu negara-negara di Eropah bersaing keras untuk tetap berada pada kedudukan inti, paling tidak pada status setengah pinggir dan tidak terlempar atau mengalami turun status menjadi masyarakat peripheral. Faktor persaingan dan kurangnya sumber daya alam (SDA) bagi bahan mentah keperluan industri mendorong mereka mengadakan ekspansi ke kawasan AAA untuk mencari bermacam-macam SDA yang murah. Ini terbukti sejak abad ke 15, 16, dan 17 tidak terbilang banyaknya armada laut bangsa-bangsa Eropah yang dilaksanakan baik oleh kerajaan maupun oleh swasta mengunjungi AAA dan menemukan kawasan-kawasan baru seperti Benua Amerika dan Australia, Kepulauan Selandia Baru, Filipina, Hawaii, kepulauan di Pasifik, dan kawasan AAA lainnya.

Oleh karena kedatangan mereka ke kawasan-kawasan tersebut dilandasi

oleh motif ekonomi kapitalistik sempit, maka pola hubungan perdagangan untuk memperoleh SDA dengan harga murah berubah menjadi sistem monopolistik yang kemudian berubah lagi menjadi sistem kolonialisme dan imperialisme dengan menguasai kawasan dan bangsa-bangsa yang memiliki SDA itu. Mulai saat itu usaha Eropah untuk mempersatukan/mengintegrasikan dunia ke dalam satu sistem kapitalis dalam rangka memenangkan persaingan antara mereka menghasilkan hubungan antara Bangsa-bangsa Eropah dengan Bangsa-bangsa AAA yang tidak seimbang yaitu hubungan antara penjajah disatu pihak dengan terjajah dilain pihak (Wallerstein, 1979).

Inilah era dimulainya *penjajahan bentuk lama* yang dilakukan oleh Bangsa-bangsa Barat dengan menjajah, menguras kekayaan alam bangsa-bangsa AAA, yang dikenal sekarang ini dengan NSB, selama 300-400 tahun. Sejarah membuktikan betapa Indonesia, Vietnam, Filipina, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Asia dan Afrika, dan sebagian besar negara-negara Arab, telah terbelenggu oleh penjajahan dari negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Portugis, Spanyol, Jerman dan Amerika Serikat (AS). Indonesia sendiri telah dijajah oleh Belanda sejak tahun 1602 sampai dengan 1945 (sampai pertengahan tahun 1949 Indonesia masih berjuang mengusir tentara Belanda yang memboncong tentara Sekutu untuk memerangi rakyat Indonesia), dan oleh Jepang sejak tahun 1942 sampai dengan 1944.

Motif pertama kedatangan Bangsa-bangsa Eropah Barat di AAA untuk memperoleh rempah-rempah dan SDA lainnya dengan mudah dan murah melalui hubungan perdagangan ternyata bergeser dan berubah arah 180 derajat dengan menjajah dan menjadikan bangsa-bangsa tersebut sebagai 'sapi perahan'. Perubahan motif dari hubungan perdagangan ke hubungan imperialistik-eksploitatif ternyata memang direncanakan oleh Bangsa-bangsa Eropah Barat agar mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan uang sepeserpun untuk memperoleh SDA dan kekayaan Bangsa-bangsa di AAA. Inilah pola hubungan antar bangsa antara Bangsa-bangsa Eropah Barat dengan Bangsa-bangsa AAA yang terjadi selama \pm 400 tahun yang *sangat tidak adil* dan merupakan *pelanggaran* terhadap hak-hak azasi manusia dari bangsa-bangsa yang disebut kedua.

Dalam waktu hampir bersamaan, terjadi pula perbudakan, penindasan dan pemusnahan yang dilakukan oleh orang-orang Putih Eropah terhadap orang-orang Hitam Amerika dan penduduk asli seperti orang-orang Indian di AS dan kawasan Benua Amerika lainnya, Aborigin di Australia dan Selandia Baru, dan orang-orang Hitam di benua Afrika. Kesemua ini merupakan konsekuensi yang *sangat menyakitkan* dari hubungan antar bangsa yang tidak seimbang, imperialistik dan eksploitatif. Pada mulanya hubungan seperti ini dilandasi oleh motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya agar mereka dapat meningkatkan status ekonomi dan politik mereka atau paling tidak tetap mempertahankan status mereka sebagai *core societies* dalam sistem dunia.

Corak dan Realitas Hubungan Antar Bangsa Masa Kini

Mulai memasuki paruh abad ke 20, pola hubungan antar bangsa yang imperialistik-eksploitatif itu telah mengalami perubahan yang agak mendasar. Hal ini bukan saja disebabkan bahwa dunia telah mengalami perubahan dalam menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil secara universal yang diharapkan meliputi seluruh umat manusia. Nilai mana bahwa hubungan antar manusia harus dilandasi oleh keadilan dan saling menguntungkan (Tim P7, 1995) dan bahwa manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan dan derajatnya ditentukan oleh ketakwaan dan amal ibadahnya (Q.S. 49 ayat 13 dalam Supriadi, dkk., 1995:85) -- sebelumnya tidak pernah menjadi perhatian, keprihatinan, dan melandasi sikap dan perbuatan Negara-negara Eropah Barat yang menganut politik luar negeri imperialistik dan rasis. Perubahan dalam pola hubungan antar bangsa masa kini juga merupakan konsekuensi logis dari hasil yang mereka terima dalam mengeksploitasi Bangsa-bangsa AAA berupa *peningkatan ekonomi* dan *akumulasi modal* yang luar biasa selama \pm 400 tahun, sehingga mereka dapat mempertahankan status ekonomi dan politik mereka dalam sistem dunia, *core* atau *semi peripheral societies*, lebih tinggi daripada status yang dimiliki oleh NSB, *peripheral societies*.

Walaupun perubahan itu telah terjadi, namun 'pertarungan' untuk mempertahankan status ekonomi dan politik yang telah dimiliki oleh masing-masing bangsa masih terus berlangsung sampai kapanpun. Tidak seperti pertarungan sebelumnya, 'pertarungan' yang terdapat di dalam hubungan antar bangsa masa kini tampaknya lebih diarahkan pada usaha menciptakan 'keuntungan' untuk 'semua pihak' bagi kesejahteraan bangsa secara menyeluruh (*global*). Akan tetapi, hubungan antar bangsa sekarang ini lebih kompleks dan mengandung resiko besar juga, khususnya bagi NSB yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajahan. Dalam menuju era globalisasi yang dilaksanakan paling lama tahun 2020, mereka harus menghadapi persaingan bebas dalam pasar bebas. Pertanyaan yang timbul adalah sanggupkah Bangsa-bangsa di NSB menghadapi corak hubungan antar bangsa yang menuntut persaingan bebas ini, padahal mereka baru saja mulai membebaskan diri dan berbenah diri dari kekuasaan penjajahan, sedangkan negara bekas penjajah telah lama siap bertarung secara bebas dan siap menerkam mangsanya. Ketidak seimbangan dalam corak hubungan antar bangsa masa kini tetap tidak terhindarkan.

Corak hubungan antar bangsa yang tidak seimbang dapat dimengerti, karena salah satu dari tiga citra penggunaan kekuasaan, menurut Charles McClelland (1981:95-96), adalah kekuasaan dipandang sebagai ciri atau atribut yang muncul dalam hubungan antar manusia/bangsa; sedangkan kekuasaan merupakan kekuatan motif dalam sistem antar bangsa (*inter-national system*) (1981:97) pada masa setiap bangsa memerlukan politik antar bangsa (*international politics*) untuk berada dalam sistem tersebut. Morgenthau

(1960:27-28) menegaskan bahwa perhatian terhadap hubungan antar bangsa pada masa kini terpusat pada politik antar bangsa yaitu pada usaha memperjuangkan kekuasaan antar negara-negara bangsa. Kekuasaan sesungguhnya menunjuk pada kemampuan untuk menang dalam 'peperangan' atau dalam berkompetisi antar bangsa (McClelland, 1981:109).

Pada kenyataannya hubungan antar bangsa pada masa sekarang ini, yang sering mengambil bentuk dalam hubungan ekonomi dan politik, lebih berdasar pada usaha memenangkan kompetisi antar bangsa-bangsa yang terlibat. Tiga kebijaksanaan yang sering diambil oleh negara-negara besar atau NIM, sebagaimana dikemukakan oleh McClelland (1981:101), dalam usaha merealisasikan corak hubungan antar bangsa tersebut di atas adalah (1) ekspansi atau imperialisme, (2) status quo, (3) gengsi/prestise. Ketiga kebijaksanaan itu saling berkaitan satu dengan lainnya.

Walaupun kebijaksanaan pertama, ekspansi atau imperialisme, dalam bentuk aslinya yang nyata dan kasar (*vulgar*) sudah tidak dianut lagi, namun jiwa ekspansionistik dan imperialistik dalam kebijaksanaan luar negeri atau politik antar bangsa yang ditampilkan oleh NIM dalam bungkus/kemasan baru sering mendominasi pola hubungan antar bangsa pada masa kini. Pinjaman luar negeri yang sangat mengikat yang bermotifkan pengendalian kekuasaan, politik dan ekonomi terhadap NSB, sering diperhalus dengan istilah 'bantuan' luar negeri (*foreign assistance*), dan tampaknya merupakan perhiasan (*accessories*) bagi hubungan antar bangsa. Kebijakan seperti ini menyembunyikan isi aslinya, ekspansi dan imperialisme gaya lama berupa eksploitasi ekonomi dan politik yang menggunakan kekuatan militer dengan menampilkan kemasan baru yang tidak kalah kasarnya, ekspansi dan imperialisme gaya baru (*new expansionism and imperialism*). Inilah politik luar negeri dari NIM dalam kerangka hubungan antar bangsa yang sering melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri NSB melalui 'bantuan' luar negeri yang mengikat dan isu hak-hak azasi manusia (HAM).

Kebijaksanaan kedua, kebijaksanaan status quo juga sering melengkapi prinsip hubungan antar bangsa, khususnya hubungan antara NIM dengan NSB. Kebijakan seperti ini pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan dan memperkuat status ekonomi dan politik serta kekuasaan yang telah diperoleh dan dimiliki oleh NIM, khususnya negara-negara Barat, dari NSB, baik pada era penjajahan maupun pada masa kini. Kebijakan status quo menempatkan bangsa-bangsa dari negara-negara yang telah lebih dulu unggul dan mapan untuk tetap bertahan dan memperkuat kedudukan mereka semula yaitu, yang oleh Wallerstein (1987) disebut, tetap sebagai status core atau paling tidak *semi peripheral* dalam sistem dunia. Selain itu, kebijaksanaan itu memberikan keunggulan bagi NIM dalam setiap aktivitas atau kiprah mereka dalam hubungan antar bangsa.

Kebijaksanaan status quo dalam hubungan antar bangsa tidak lahir dan dipraktikkan begitu saja, tetapi ia diperkuat secara paradigmatik oleh Teori

Sistem Fungsional (lihat analisis kritis Alqadrie, 1989; 1992b), yang berakar pada paradigma Fungsionalisme, masyarakat dunia dianggap sebagai suatu sistem, dus, ia merupakan organisme yang hidup, yang bagian-bagiannya (sub sistem) berhubungan satu dengan lainnya. Analisis fungsional menyebutkan bahwa perubahan pada bagian-bagiannya (negara-negara bangsa merupakan bagian dari sistem dunia) akan membawa perubahan pada sistem secara keseluruhan, begitu pula sebaliknya. Perubahan yang tidak terkendalikan atau tidak berfungsinya sub-sub sistem cenderung mengganggu atau mengancam keberadaan sistem dunia. Untuk itu diperlukan keseimbangan dalam berjalannya suatu sistem dunia.

Untuk mempertahankan dan memelihara keseimbangan suatu sistem, berdasarkan analisis fungsionalisme (Parsons, 1968) diperlukan nilai-nilai yang disepakati bersama (*shared values*) dan standar keinginan yang diterima secara umum (*standard of desirability*) sebagai konsep sentral. Dalam konteks hubungan antar bangsa di dalam sistem dunia, nilai-nilai yang disepakati bersama dan standar keinginan yang diterima secara umum bukan merupakan nilai-nilai dan standar keinginan yang berasal atau dipersatukan dari seluruh bangsa, termasuk yang berasal dari NSB, tetapi mereka adalah nilai-nilai dan keinginan dari negara dan bangsa yang telah mapan dan dominan, yaitu NIM atau negara Barat yang dipimpin oleh AS sebagai pelopor masyarakat inti. Bangsa-bangsa inilah dengan dominasi mereka di bidang ekonomi, politik dan budaya, memaksakan kehendak mereka agar nilai-nilai dan standar keinginan mereka disepakati dan diterima dalam sistem dunia kapitalis yang global.

Corak hubungan tidak seimbang semacam ini telah mewarnai hubungan antar bangsa masa kini dengan dalih untuk 'ketertiban' dan 'kestabilan' dunia, 'kesejahteraan' seluruh bangsa dan 'perdamaian' dunia. Padahal, dominasi dalam nilai-nilai budaya, standar keinginan, bidang ekonomi, tidak lain adalah untuk kepentingan ekonomi sempit dari negara-negara tersebut. Bagi negara yang 'tidak patuh', seperti Indonesia pada masa 1959-1965, Vietnam sebelum 1992, Cuba, Iran, Libya, dan lainnya, dianggap sebagai 'pembuat keonaran' (*trouble makers*) yang 'mengganggu/mengancam' kestabilan/ketertiban dunia dan perlu diberi pelajaran, diembargo, dan kalau perlu dihancurkan. Malaysia, di bawah Mahathir Mohammad, bahkan pernah diamati secara khusus oleh negara-negara Barat, karena dipandang ia telah menjadi 'anak nakal' dan 'Sukarno kecil' yang tidak begitu saja mau menerima apa yang disodorkan dan dipaksakan oleh mereka.

Kebijakan ketiga, gengsi/prestise diwujudkan dalam bentuk budaya massa dan budaya material yang ditampilkan secara gemerlapan oleh NIM, khususnya AS, melalui media massa (TV dan Filem) dengan tujuan sekedar untuk menunjukkan keunggulan ekonomi dan politik mereka terhadap NSB. Penampilan gengsi atau prestise ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan dan dominasi mereka terhadap NSB, dan di atas penampilan yang bergengsi/berprestise itulah hubungan antar bangsa masa kini dibangun dan

dijalankan. Penampilan bergengsi/berprestise itu terwujud pula dalam bentuk budaya Coca-Cola, pameran kemewahan dan pemilikan senjata-senjata mutakhir termasuk senjata nuklir, sedangkan dilain pihak senjata sejenis sudah tidak dapat lagi dimiliki oleh NSB.

Kesenjangan dalam pemilikan senjata canggih juga mewarnai hubungan antar bangsa masa kini. Kesenjangan itu pada akhirnya dapat menjadi alat pemaksa dalam hubungan antar bangsa.

Daftar Kepustakaan

Alqadrie, Syarif I. 1987. 'Cultural Differences and Social Life Among Three Ethnic Groups in West Kalimantan, Indonesia'. M.Sc. Thesis, Lexington: University of Kentucky, USA.

_____, 1987. 'Paradigma Dalam Ilmu Sosial', dalam *Suara Almamater*. No. 8, November (Jurnal Ilmiah Resmi Universitas Tanjungpura, Pontianak).

_____, 1991a. *Latar Belakang dan Kehidupan Sosioekonomi dan Budaya Petani Transmigran Madura di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak*. Pontianak: Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura.

_____, 1991b. 'Pembangunan, Ketergantungan dan Kesadaran Etnik' dalam *Suara Almamater*. No. 1, April.

_____, 1992a. *Latar belakang dan Kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi Petani Bugis di Kalimantan Barat: Studi Kasus di Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Siantan Hilir, Kabupaten Pontianak*. Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura.

_____, 1992b. 'Etnisitas, Religiusitas dan Perubahan Sosial, dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mereka' dalam *Proyeksi*. No. 1 Tahun III, Agustus (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura).

_____, 1993. *Dampak Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Pedalaman Kalimantan Barat*.

Durkheim, Emile. 1984. Translated by W.D. Hall. *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.

McClelland, Charles A. 1991. Penyunting Hilman Adil *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali.

Morgenthau, Hans J. 1960. *Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.

Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. Clencoe, Illinois: Free Press.

_____, 1968. *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.

Purnamawati. 1996. 'Kaum Wanita Perlu Belajar Ilmu Bela Diri' dalam *Harian AKCAYA*. Pontianak, 7 Januari.

Sukirno, Sadono, 1981. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Supriadi dan Pabali Musa, dkk. 1995. *Pendidikan Agama Islam*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Tim P7. 1995. *Ceramah Ketua Tim P7 Pada Penataran Calon Penatar P-4 Tingkat Nasional Bagi Para Rektor, Pembantu Rektor dan Dekan PTN dan IAIN Tentang Undang-undang Dasar 1945*. Bogor: BP7 Pusat.

Tohir, Kaslan A. 1971. *Ekonomi Selayang Pandang* Bandung: Penerbit Sumur.

Wallerstein, Emmanuel. 1979. *The Capitalist World Economy*. New York: Cambridge University Press.

_____, 1987. 'World System Analysis'. pp. 309-324 dalam Anthony Giddens and Jonathan H. Turner (eds.) *Social Theory Today*. Stanford: Stanford University Press.